

Indonesia Butuh Indikator Alternatif

BANDUNG, (PR).-

Penggolongan masyarakat berdasarkan status sosialnya dalam indikator statistik keberhasilan pembangunan tidak pernah dimasukkan oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan banyak elemen masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, merasa tidak terwakili oleh klaim pemerintah tentang tingkat keberhasilan suatu pembangunan.

"Selama ini, pemerintah selalu menerbitkan angka rata-rata umum ketika melaporkan data statistik kepada publik. Masalahnya, jumlah rata-rata dalam konsep statistik selalu mengambil dari nilai yang paling tinggi," ujar Ketua Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Unpad Arief Anshory Yusuf, saat dihubungi "PR", Minggu (14/10).

Jika ditarik ke contoh data statistik tentang pendapatan masyarakat, ia menilai itu bisa berdampak pada hanya masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas yang tercerminkan dalam angka statistik. "Sementara masyarakat dari golongan menengah ke bawah tidak," tuturnya.

Inti permasalahan, menurut Arief, bukan pada salahnya metode perhitungan indikator-indikatornya. "Tetapi, masyarakat

melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terepresentasikan oleh indikator-indikator itu," ujarnya.

Berkaca pada kondisi tersebut, Arief mengatakan, pihaknya sedang menginisiasi *dashboard online* dengan alamat www.keberpihakan.org.

Dia menuturkan, beberapa indikator alternatif yang nantinya di-*publish* di *dashboard online* tersebut, seperti kemiskinan, pendidikan, kualitas kesehatan, dan lainnya.

Terkait indikator tingkat kemiskinan, selama ini indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah adalah mereka yang memiliki pendapatan Rp 200.000/orang. Padahal, ada indikator alternatif yang diakui dunia internasional, yakni pendapatan sebesar 2 dolar AS/orang, atau sekitar Rp 10.000/orang.

"Berdasarkan data pemerintah, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp 32 juta per tahun atau 11 ju-

ta per bulan per keluarga. Betulkah kebanyakan rakyat Indonesia sesejahtera itu? Padahal, Bank Dunia menghitung bahwa penduduk miskin Indonesia, yakni yang hidup di bawah Rp 10.000 per hari per orang, masih lebih dari 100 juta orang," ujarnya.

Hal itu, menurut Arief, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sebagian besarnya masih dinikmati segelintir orang. **(A-204)*****